

Analisis Dampak Penerjunan Praja IPDN Terhadap Ketahanan Kesehatan dan Sanitasi Dalam Pemulihan Pasca Bencana Banjir (Studi Kasus Kabupaten Aceh Tamiang Indonesia)

Ferdi Ramadhansyah¹, Rhesas Shalatan².

¹Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat,
Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.
E-mail: 35.0866@praja.ipdn.ac.id (CA)

Abstrak: Banjir merupakan bencana yang seringkali menimpa Indonesia, salah satunya adalah kasus bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang dalam beberapa bulan terakhir. Kajian ini bertujuan menganalisis dampak penerjunan Praja IPDN terhadap ketahanan kesehatan masyarakat dan ketahanan sanitasi dalam rehabilitasi pascabanjir di Aceh Tamiang. Kajian ini menerapkan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) melalui observasi lapangan, identifikasi permasalahan, pelaksanaan intervensi, dan evaluasi. Artikel ini menunjukkan bahwa keterlibatan Praja IPDN mempercepat pembersihan fasilitas umum, drainase, permukiman, dan perkantoran, sehingga mendukung pemulihan layanan publik, menurunkan risiko penyakit berbasis lingkungan, serta mempercepat pemulihan sanitasi. Namun, kontribusi tersebut bersifat sebagai katalisator pemulihan jangka pendek sehingga memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, pendampingan teknis, dan partisipasi masyarakat. Artikel ini menyimpulkan bahwa penerjunan Praja IPDN berkontribusi positif terhadap penguatan ketahanan kesehatan dan sanitasi pascabanjir.

Kata Kunci: Praja IPDN; Ketahanan Kesehatan; Ketahanan Sanitasi; Rehabilitasi Pascabanjir.

Sitasi: Ramadhansyah, F., & Shalatan, R. (2026). Analisis Dampak Penerjunan Praja IPDN Terhadap Ketahanan Kesehatan dan Sanitasi Dalam Pemulihan Pasca Bencana Banjir: (Studi Kasus Kabupaten Aceh Tamiang Indonesia). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(6), 656–670. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i6.1077>

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara di ASEAN memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam atau ulah manusia itu sendiri. Kondisi ini dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Lempeng Eurasia di bagian utara, Lempeng Pasifik di bagian timur, dan Lempeng Indo-Australia di bagian selatan. Letak ini menyebabkan Indonesia kerap tertimpa bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi. Selain

itu, salah satu bencana yang sering menimpa Indonesia adalah banjir ([Basriwijaya et al., 2026](#)). Banjir merupakan kejadian ketika suatu wilayah atau kawasan yang berada pada kondisi normal tidak tergenang air mengalami genangan air dalam volume yang besar. Secara umum, banjir terjadi ketika volume air melebihi kapasitas saluran drainase atau daerah tampungan, sehingga menyebabkan berbagai dampak yang merugikan kehidupan sosial, ekonomi, dan fisik ([Alifa et al., 2025](#)).

Banjir bandang yang menerjang sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh pada penghujung tahun 2025 merupakan salah satu peristiwa hidrometeorologi terbesar yang pernah dialami wilayah tersebut dalam beberapa dekade terakhir. Aceh Tamiang tercatat sebagai daerah yang paling terdampak, bahkan sempat mengalami kelumpuhan total roda pemerintahan akibat seluruh kompleks perkantoran kabupaten terendam lumpur ([Tempo, 2026](#)). Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, menyebutkan bahwa Aceh Tamiang merupakan satu-satunya pemerintahan kabupaten/kota yang aktivitasnya benar-benar terhenti karena seluruh kantor pemerintahan tergenang lumpur ([Tempo, 2026](#)). Kondisi ini bukan sekadar persoalan kerusakan fisik infrastruktur, melainkan juga memunculkan krisis kesehatan masyarakat dan krisis sanitasi lingkungan yang kompleks, mengingat endapan lumpur pascabanjir menjadi medium ideal bagi pertumbuhan dan penyebaran berbagai patogen, termasuk bakteri *Leptospira* penyebab leptospirosis, organisme penyebab diare, serta vektor penyakit berbasis air lainnya ([Akaishi et al., 2021](#)).

Banjir yang melanda wilayah tersebut menyebabkan kerusakan pada pemukiman, fasilitas umum, menghambat aktivitas masyarakat, serta menciptakan krisis pangan dan kekurangan air bersih ([Agustina et al., 2025](#)). Hal ini karena adanya endapan lumpur yang menutupi seluruh kawasan pemukiman, terganggunya system drainase, dan menurunnya kualitas kebersihan lingkungan yang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan masyarakat. Kondisi ini melihat bahwa proses rehabilitasi tidak hanya diarahkan pada pemulihan infrastruktur, tapi juga harus diarahkan pada pemulihan kualitas lingkungan yang mendukung terciptanya kondisi kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi pascabanjir di Aceh Tamiang, pemerintah melalui Kemendagri menerjunkan Praja IPDN untuk membantu proses pemulihan di wilayah terdampak banjir tersebut. Keterlibatan Praja IPDN ini diwujudkan dengan berbagai kegiatan, seperti pembersihan fasilitas umum, jalan, drainase, fasilitas olahraga, rumah warga, pemulihan kantor pemerintahan, pembersihan lumpur, dan makam raja di Aceh Tamiang ([Tempo, 2026](#)). Kendati Praja IPDN bukan tenaga Kesehatan maupun tenaga sanitasi profesional, aktivitas yang dilaksanakan memiliki potensi memberikan dampak tidak langsung terhadap peningkatan kualitas

lingkungan, pengurangan risiko penyakit, dan percepatan pemulihan kondisi sanitasi pascabanjir.

Dari sudut pandang ketahanan kesehatan, keterlibatan berbagai komponen pemerintah dalam rehabilitasi pascabencana merupakan bagian dari upaya membangun kemampuan masyarakat dan institusi dalam mencegah, merespons, dan memulihkan dampak kesehatan akibat bencana yang terjadi. Demikian pula dengan ketahanan sanitasi yang melihat kemampuan suatu wilayah dalam memulihkan akses terhadap air bersih, pengelolaan material sisa banjir, sistem drainase, dan kebersihan lingkungan, hal ini sehingga mampu menekan risiko penyebaran penyakit. Dari ini, keberhasilan rehabilitasi pascabanjir tidak hanya dikalkulasikan dari pulihnya kondisi fisik wilayah, tapi juga dari kemampuan menjaga keberlanjutan kesehatan masyarakat dan kualitas sanitasi lingkungan. Bertolak dari pemaparan diatas, maka penulis melalui tulisan ini ingin mengkaji: (1) bagaimana dampak penerjunan Praja IPDN terhadap ketahanan kesehatan masyarakat? dan (2) bagaimana dampak penerjunan Praja IPDN terhadap ketahanan sanitasi dalam pemulihan pascabanjir di Aceh Tamiang.

2. Metode

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengadopsi metode *Participatory Action Research* (PAR), yaitu pendekatan yang menekankan keterlibatan aktif antar kelompok. Metode ini dipilih agar proses kegiatan dapat diterapkan secara tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan tingkat prioritas yang dihadapi.

Poto Kegiatan Praja IPDN di Kabupaten Aceh Tamiang



Foto Kegiatan Praja IPDN di Kabupaten Aceh Tamiang	
Gambar 1. Foto Bersama Praja IPDN	Gambar 2. Praja Membersihkan Lumpur
	
Gambar 3. Praja Membersihkan Endapan Lumpur di Rumah Warga	Gambar 4. Praja Membersihkan Lumpur di Instansi Pemerintah

Sumber: Data berasal dari penulis yang terlibat langsung dalam kegiatan ini

Kegiatan ini merupakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Aceh Tamiang sekaligus sebagai bentuk kegiatan dalam memberikan edukasi dalam penanggulangan pra bencana banjir disertai dengan program pengelolaan sampah dan juga pengelolaan air limbah. Pelaksanaan program melibatkan 25 personel Satgas Kementerian Dalam Negeri yang berasal dari Praja IPDN Kampus Sulawesi Selatan (Dharma C). Seluruh kegiatan berada di bawah koordinasi operasional lapangan Bapak Muhammad Nurcholis, S.STP., M.Si. Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri atas beberapa langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi dan pemetaan permasalahan, yaitu melakukan survei lapangan untuk menilai ketebalan endapan lumpur serta tingkat kerusakan pada sejumlah ruangan penting di lingkungan PKK, melakukan pengajaran kepada warga setempat dalam menanggulangi bencana alam berupa banjir dan juga mengelola sampah (puing-puing bangunan dan pohon roboh) agar dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan juga mengelola air limbah yang sudah bercampur dengan lumpur agar tidak mencemari lingkungan sekitar.
2. Penyusunan rencana aksi berdasarkan skala prioritas, dengan menentukan area yang harus segera dibersihkan, terutama jalur akses utama menuju kantor, ruang rapat (Aula) dan Ruang Sekretaris dan Pengurus. Selain itu, diberikan juga edukasi

pentingnya menjaga lingkungan dan juga cara mengelola limbah agar bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pelaksanaan intervensi fisik, melalui pengerahan personel secara intensif yang didukung penggunaan alat pembersih bertekanan tinggi (*water jet*), armada dump truck untuk mengangkut endapan lumpur dari lokasi terdampak dan juga alat berat seperti ekskavator yang sangat berkontribusi dalam pembersihan jalur akses utama menuju kantor.
4. Evaluasi keberhasilan secara kuantitatif dan kualitatif, yang dilakukan dengan mengukur persentase area kantor yang telah berhasil dibersihkan dari material sisa bencana serta menilai kesiapan fasilitas tersebut untuk kembali digunakan dalam pelayanan dan melihat bagaimana Tingkat kualitas kelayakan halaman pascapengendapan lumpur yang sangat lama serta melihat kelayakan bangunan yang diperkirakan mengalami kerusakan sekitar 40% berupa atap-atap, dinding bangunan, kamar mandi dan juga jendela.

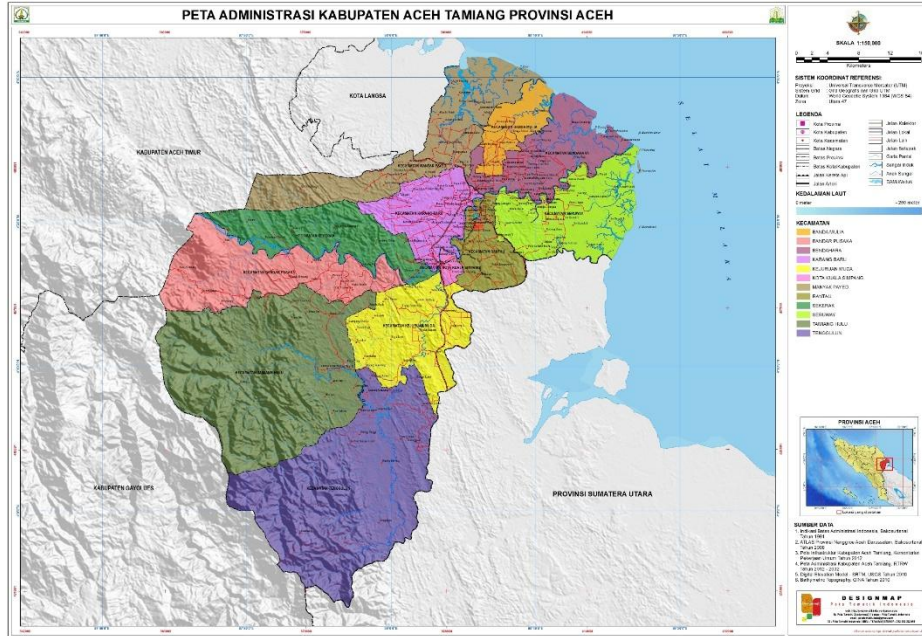
Program utama dalam kegiatan pengabdian ini diberi nama "Sinergi Praja Restorasi Birokrasi." Program tersebut berfokus pada dua sasaran utama, yaitu pemulihan kondisi fisik sarana, pemberian edukasi penanggulangan bencana serta pengelolaan limbah yang masih bisa dimanfaatkan kembali dan prasarana pemerintahan yang terdampak endapan lumpur serta penyelamatan dan relokasi arsip dan surat yang terdapat di kantor PKK yang memiliki nilai penting. Melalui program ini, data historis terkait pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Tamiang dapat diselamatkan, sekaligus mendukung beroperasinya kembali layanan publik yang berperan penting dalam mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi Masyarakat.

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di bagian timur Pulau Sumatra dan berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan UU No. 4 Tahun 2002 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dengan ibu kota di Karang Baru. Secara astronomis, Kabupaten Aceh Tamiang terletak pada 3°53'18"-4°32'56" Lintang Utara (LU) dan 97°43'41"-98°14'45" Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah sekitar 1.956,72 km² yang terbagi ke dalam 12 kecamatan. Posisinya yang berada di Jalur Lintas Timur Sumatra menjadikan wilayah ini sebagai pintu gerbang Provinsi Aceh dari arah timur sekaligus memiliki peran strategis dalam aktivitas transportasi dan perdagangan.

Secara geografis, bentang alam Kabupaten Aceh Tamiang bervariasi, mulai dari dataran rendah di bagian utara dan timur, dataran bergelombang di wilayah tengah, hingga kawasan perbukitan dan pegunungan di bagian selatan dan barat yang merupakan bagian dari Ekosistem Leuser. Kondisi topografi tersebut membentuk sistem hidrologi yang didominasi oleh Sungai Tamiang beserta anak-anak sungainya

Ferdi Ramadhansyah & Rhesas Shalatan.

Gambar 5. Peta Kabupaten Aceh Tamiang



Sumber: Peta Tematik Indonesia

Karakteristik bentang wilayah yang terlihat dalam gambar diatas ini menyebabkan Kabupaten Aceh Tamiang memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, khususnya banjir. Wilayah dataran rendah di bagian hilir lebih rentan mengalami genangan akibat luapan Sungai Tamiang, terutama ketika curah hujan tinggi terjadi di kawasan hulu maupun hilir secara bersamaan. Oleh karena itu, kondisi geografis dan bentang alam Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pola pemanfaatan ruang, aktivitas masyarakat, dan tingkat risiko bencana di wilayah tersebut.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Dampak Penerjunan Praja IPDN terhadap Ketahanan Kesehatan Masyarakat

Ketahanan kesehatan masyarakat pascabencana pada dasarnya merupakan kemampuan suatu sistem sosial untuk mempertahankan atau memulihkan fungsi layanan kesehatan dasar serta mencegah lonjakan kesakitan akibat gangguan lingkungan yang ditimbulkan bencana (Sakti et al., 2026). Dalam kasus Aceh Tamiang, kerusakan yang dialami fasilitas kesehatan tergolong parah, sebagaimana terlihat dari kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang yang sempat lumpuh total karena seluruh area, mulai dari halaman,

lorong, hingga ruang perawatan, tertutup lumpur sisa banjir. Pembersihan RSUD tersebut dilakukan secara gotong royong oleh aparat TNI, pegawai PLN, dan relawan, dengan dukungan alat berat berupa ekskavator untuk mengangkut material lumpur ([Kompas, 2026](#)). Pola kolaborasi lintas-sektor semacam ini sejalan dengan prinsip ketahanan kesehatan berbasis komunitas yang menekankan pentingnya sinergi antara unsur pemerintah, masyarakat sipil, dan kelompok sukarelawan dalam memulihkan fungsi layanan esensial pascabencana ([Kemenkes, 2026](#); [Nurjanah, et al., 2026](#)).

Pelibatan praja IPDN memberi nilai tambah tersendiri terhadap proses ini, sebab jumlah personel yang relatif besar mencapai lebih dari dua ribu orang dalam tiga gelombang penugasan, hal ini memungkinkan percepatan pembersihan area-area krusial yang menjadi prasyarat beroperasinya kembali layanan kesehatan dan pemerintahan. Berdasarkan data Satgas PRR, hingga awal April 2026 masih terdapat puluhan sekolah, fasilitas umum, dan perkantoran yang menjadi sasaran pembersihan lumpur di Aceh Tamiang ([Tempo, 2026](#)), dan kehadiran praja gelombang ketiga sebanyak 731–733 orang ditargetkan menuntaskan empat puluh dua titik lokasi dalam kurun waktu satu bulan, termasuk sepuluh rumah warga, dua puluh dua saluran drainase, tujuh ruas jalan, dan tiga fasilitas sosial dan umum ([Kompas, 2026](#)).

Kecepatan pembersihan ini memiliki kaitan erat dengan ketahanan kesehatan masyarakat, sebab semakin lama lumpur dan genangan air dibiarkan menumpuk di area permukiman dan fasilitas publik, semakin tinggi pula risiko proliferasi vektor penyakit serta paparan zoonosis seperti leptospirosis. Sejalan dengan hal ini, kajian epidemiologi leptospirosis di wilayah dataran tinggi Ponorogo menunjukkan bahwa faktor lingkungan seperti genangan air, sanitasi buruk, dan keberadaan tikus pengerat memiliki asosiasi kuat dengan peningkatan kasus penularan, sehingga pengurangan paparan lingkungan menjadi strategi pencegahan utama ([Notobroto, Mirasa, & Rahman, 2021](#)).

Lebih jauh, keterlibatan praja IPDN juga harus dipahami dalam kerangka pemulihan kapasitas layanan kesehatan formal, bukan semata pembersihan fisik. Pemulihan empat unit Puskesmas yang masih tertimbun lumpur di wilayah terdampak banjir Sumatra, misalnya, memerlukan dukungan rotasi tenaga relawan kesehatan setiap dua minggu agar layanan kepada masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan pengungsian, tetap dapat berjalan ([IDM TIMES, 2026](#)). Dalam konteks ini, keberadaan praja IPDN yang membantu membersihkan akses jalan menuju fasilitas kesehatan dan area sekitarnya turut mempercepat proses tersebut, meskipun peran utama pelayanan medis tetap berada di tangan tenaga kesehatan profesional dan organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah Indonesia

(PMI) yang juga aktif mendirikan klinik darurat di Aceh Tamiang sejak masa tanggap darurat.

Namun demikian, analisis terhadap pola penugasan ini juga memperlihatkan sejumlah celah yang perlu mendapat perhatian. *Pertama*, dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja, tidak ditemukan informasi publik yang memadai mengenai standar perlindungan diri bagi praja yang bekerja kontak langsung dengan lumpur dan genangan air yang berpotensi terkontaminasi *Leptospira* maupun patogen lain. Literatur menunjukkan bahwa pekerja dan relawan yang terpapar lumpur banjir tanpa alat pelindung memadai, seperti sepatu bot dan sarung tangan tahan air, berisiko tinggi mengalami penularan leptospirosis melalui luka terbuka di kulit (Anggraini, & Hartutik, 2024). Mengingat status praja IPDN sebagai peserta didik yang relatif berusia muda dan dalam kondisi fisik prima, risiko ini mungkin tidak langsung terlihat secara klinis dalam jangka pendek, tetapi tetap berpotensi menimbulkan kasus tersembunyi yang baru terdeteksi setelah masa inkubasi berakhir, mengingat gejala awal leptospirosis seperti demam, nyeri otot, dan sakit kepala kerap kali tidak dikenali sebagai tanda bahaya oleh masyarakat awam (Kemenkes, 2024).

Kedua, durasi penugasan yang dirancang sebagai bagian dari kurikulum pendidikan menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan dampak kesehatan setelah masa penugasan berakhir. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bahkan menyebut gelombang ketiga sebagai kemungkinan penugasan terakhir, seiring membaiknya kondisi pemerintahan dan layanan publik di Aceh Tamiang (Tempo, 2026). Dengan demikian, kontribusi praja IPDN terhadap ketahanan kesehatan masyarakat di Aceh Tamiang dapat dipahami sebagai katalisator pemulihan jangka pendek yang signifikan, namun keberlanjutannya sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan mampu melembagakan hasil kerja tersebut ke dalam sistem kesehatan masyarakat yang permanen.

Dimensi lain yang relevan untuk dikaji adalah peran praja IPDN dalam mendukung pemulihan psikososial masyarakat terdampak, yang sesungguhnya juga merupakan bagian integral dari ketahanan kesehatan secara holistik. Bencana berskala besar seperti banjir bandang di Aceh Tamiang tidak hanya menimbulkan dampak fisik berupa kerusakan harta benda dan ancaman penyakit menular, tetapi juga tekanan psikologis yang signifikan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan rasa aman (Erick et al., 2026). Kehadiran praja IPDN yang turut membersihkan rumah-rumah warga secara langsung, sebagaimana terlihat dari kegiatan pembersihan di Desa Kota Kuala Simpang dan Desa

Kampung Bundar ([Tempo, 2026](#)), memiliki dimensi simbolis yang penting, yaitu menghadirkan rasa kehadiran negara (*state presence*) di tengah masyarakat yang sedang mengalami masa-masa sulit. Dukungan emosional dan sosial semacam ini, meskipun sulit diukur secara kuantitatif, sering kali menjadi faktor penentu dalam mempercepat pemulihan psikososial komunitas pascabencana, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian mengenai peran modal sosial dan solidaritas kolektif dalam mitigasi dampak psikologis bencana alam ([Erick et al., 2026](#)).

Selain itu, perlu pula dicermati bahwa pola kerja praja IPDN yang dilaksanakan secara bergelombang dengan fokus berbeda pada setiap tahapnya menunjukkan adanya perencanaan yang cukup adaptif terhadap perkembangan kebutuhan di lapangan. Pada gelombang pertama, fokus utama adalah memulihkan fungsi pemerintahan yang lumpuh total, sedangkan pada gelombang kedua dan ketiga, fokus bergeser ke arah pemulihan lingkungan masyarakat dan fasilitas sosial ([Kompas, 2026](#); [DetikNews, 2026](#); [Tempo, 2026](#); [Kantor Staf Presiden, 2026](#)). Pola pentahapan semacam ini sejalan dengan prinsip manajemen bencana yang menekankan pentingnya penyesuaian prioritas intervensi sesuai dengan fase pemulihan yang sedang berlangsung, di mana fase awal umumnya menitikberatkan pada pemulihan fungsi vital pemerintahan dan layanan darurat, sementara fase lanjutan lebih berorientasi pada pemulihan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan adaptasi semacam ini turut menjadi indikator bahwa keterlibatan praja IPDN, meskipun berasal dari institusi pendidikan dan bukan lembaga kesehatan, dapat disinergikan secara efektif dengan kebutuhan riil pemulihan kesehatan masyarakat apabila dikelola dengan perencanaan yang matang oleh Satgas PRR.

3.2. Dampak Penerjunan Praja IPDN terhadap Ketahanan Sanitasi dalam Pemulihan Pascabanjir

Ketahanan sanitasi pascabencana merujuk pada kapasitas suatu wilayah untuk memulihkan dan mempertahankan fungsi infrastruktur dasar berupa pengelolaan air bersih, drainase, dan pembuangan limbah, sekaligus membangun perilaku higienis masyarakat yang dapat bertahan meski terjadi guncangan lingkungan berikutnya. Endapan lumpur yang menutupi Aceh Tamiang dengan ketebalan mencapai empat hingga lima meter di sejumlah titik ([ATR BPN, 2026](#); [ANTARA News, 2026](#)) bukan sekadar persoalan estetika lingkungan, melainkan representasi nyata dari rusaknya sistem sanitasi dasar, sebab lumpur tersebut menyumbat saluran drainase, mencemari sumber air, dan menciptakan genangan permanen yang menjadi tempat berkembang biaknya berbagai mikroorganisme patogen.

Dalam konteks ini, keterlibatan praja IPDN menunjukkan kontribusi paling konkret, hal ini karena sebagian besar aktivitas penugasan praja, terutama pada gelombang kedua dan ketiga, secara eksplisit difokuskan pada pembersihan saluran drainase, sebagaimana terlihat dari target dua puluh dua titik drainase yang harus dituntaskan dalam satu bulan penugasan gelombang ketiga ([CNN Indonesia, 2026](#)). Pemulihan fungsi drainase memiliki signifikansi epidemiologis yang besar karena saluran air yang tersumbat menjadi salah satu penyebab utama genangan berkepanjangan pascabanjir, yang pada gilirannya memperpanjang masa kontak masyarakat dengan air terkontaminasi. Studi observasional multisenter di Jepang menemukan bahwa pemulihan pasokan air bersih yang berkorelasi dengan perbaikan sanitasi toilet secara bersamaan menunjukkan hubungan terkuat dengan penurunan prevalensi penyakit infeksi gastrointestinal di lokasi pengungsian pascabencana ([Akaishi et al., 2021](#)). Artinya, semakin cepat sistem drainase dan sanitasi dipulihkan, semakin besar pula peluang untuk memutus rantai penularan penyakit berbasis air di tengah masyarakat terdampak.

Selain drainase, praja IPDN turut terlibat dalam pembersihan fasilitas umum dan sosial yang berfungsi sebagai simpul layanan dasar masyarakat, termasuk sekolah, kantor pemerintahan, dan bahkan situs bersejarah seperti Istana Benua Raja yang memiliki nilai budaya sekaligus fungsi sosial bagi warga setempat ([Shaquille et al., 2026](#); [Putra et al., 2026](#); [InfoPublik, 2026](#)). Sepanjang satu bulan masa kerja gelombang kedua misalnya, tercatat sebanyak 4 dusun difokuskan pada pemulihan akibat dampak lumpur ([Tempo, 2026](#)). Pemulihan fasilitas pendidikan memiliki relevansi tidak langsung namun penting terhadap ketahanan sanitasi, mengingat sekolah merupakan salah satu titik strategis penyebaran edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kepada anak-anak dan keluarga mereka ([Rambe et al., 2026](#)).

Kendati demikian, pembersihan lumpur secara manual menggunakan sekop dan cangkul, sebagaimana digambarkan dalam pemberitaan resmi ([Pemerintah Aceh, 2026](#); [Info Publik, 2026](#)), pada dasarnya merupakan intervensi tahap awal pemulihan sanitasi yang bersifat darurat (*emergency sanitation*), bukan solusi struktural jangka panjang. Dengan kata lain, pekerjaan yang dilakukan praja IPDN dapat dikategorikan sebagai prasyarat penting namun belum cukup (*necessary but not sufficient condition*) bagi terciptanya ketahanan sanitasi yang utuh di Aceh Tamiang.

Aspek lain yang patut dicermati adalah potensi paradoks dalam proses pembersihan lumpur itu sendiri. Tanpa prosedur pengelolaan limbah lumpur yang baik, material yang diangkut dari area permukiman dan fasilitas umum berisiko

hanya berpindah lokasi tanpa benar-benar terdekontaminasi, sehingga tetap menjadi sumber pencemaran sekunder ([Muslimah, 2015](#)), terutama jika dibuang di dekat badan air atau lahan pertanian yang masih digunakan masyarakat. Oleh karena itu, dampak positif penerjunan praja IPDN terhadap ketahanan sanitasi akan jauh lebih optimal apabila disertai program edukasi kesehatan lingkungan yang melibatkan masyarakat secara aktif, bukan semata-mata menempatkan praja sebagai tenaga kerja fisik tambahan.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, penugasan praja IPDN dalam pemulihan sanitasi pascabanjir juga mencerminkan praktik kolaborasi lintas-lembaga yang relevan dengan konsep *whole-of-government approach* dalam manajemen bencana modern. Keterlibatan unsur TNI, PLN, relawan kemanusiaan, serta praja IPDN secara simultan dalam membersihkan fasilitas kesehatan dan sanitasi menggambarkan model gotong royong lintas-sektor yang sejalan dengan nilai budaya gotong royong sebagai modal sosial khas Indonesia dalam penanganan krisis kolektif ([Wahyudi et al., 2026](#)). Modal sosial semacam ini, jika dikelola secara terstruktur, berpotensi mempercepat pemulihan sanitasi dengan biaya operasional yang relatif lebih rendah dibandingkan skema kontrak jasa pembersihan komersial, sekaligus menanamkan kesadaran kebencanaan pada generasi calon pemimpin pemerintahan daerah sejak dini.

Dengan jumlah personel yang mencapai ratusan hingga lebih dari seribu orang dalam satu gelombang, maka pembersihan drainase, bukan hanya sekadar mengangkat lumpur dari permukaan saluran, melainkan memerlukan pemahaman teknis mengenai kemiringan saluran, titik-titik penyumbatan, dan cara memastikan aliran air kembali normal tanpa menimbulkan genangan baru di lokasi pembuangan. Tanpa pendampingan teknis dari dinas pekerjaan umum atau tenaga ahli sanitasi lingkungan, terdapat risiko bahwa hasil kerja praja IPDN, meskipun masif dari sisi volume, belum tentu optimal dari sisi efektivitas fungsional jangka panjang. Pemberitaan resmi memang menyebutkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam kegiatan ini, termasuk Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dan pemerintah daerah setempat ([Gemarnews, 2026](#)), tapi informasi publik mengenai keterlibatan tenaga ahli sanitasi atau dinas lingkungan hidup secara spesifik dalam pendampingan teknis di lapangan masih relatif terbatas, sehingga aspek ini perlu menjadi perhatian dalam evaluasi kebijakan ke depan.

Dari sisi keberlanjutan kelembagaan, penting pula dicatat bahwa target wilayah penugasan Satgas PRR tidak terbatas pada Aceh Tamiang semata, melainkan mencakup delapan belas kabupaten/kota terdampak banjir di Sumatra, dengan

enam lokasi prioritas meliputi Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya (JPNN, 2026). Implikasinya, sumber daya praja IPDN yang tersedia harus didistribusikan secara proporsional ke berbagai wilayah tersebut, yang pada gilirannya membatasi intensitas dan durasi penugasan di masing-masing lokasi, termasuk Aceh Tamiang. Keterbatasan ini menegaskan pentingnya strategi keluar (*exit strategy*) yang jelas, di mana pada saat praja IPDN menyelesaikan masa tugasnya, tanggung jawab pemulihan sanitasi dan kesehatan lingkungan jangka panjang harus sepenuhnya beralih kepada pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan dinas pekerjaan umum setempat, didukung oleh partisipasi aktif masyarakat melalui forum-forum kesehatan berbasis desa.

4. Penutup

Penerjunan Praja IPDN dalam rehabilitasi pascabanjir di Aceh Tamiang memberikan dampak positif terhadap ketahanan kesehatan masyarakat melalui percepatan pembersihan fasilitas umum, akses menuju fasilitas kesehatan, permukiman warga, dan lingkungan terdampak banjir. Kegiatan tersebut berkontribusi mengurangi risiko penyebaran penyakit akibat endapan lumpur dan genangan air, mempercepat pemulihan layanan publik, serta memberikan dukungan psikososial bagi masyarakat terdampak. Namun, kontribusi tersebut lebih bersifat sebagai katalisator pemulihan jangka pendek sehingga keberlanjutannya memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, penerapan standar keselamatan kerja, dan integrasi dengan sistem kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.

Terhadap ketahanan sanitasi, keterlibatan Praja IPDN berkontribusi melalui pembersihan drainase, pengangkutan endapan lumpur, pemulihan fasilitas pemerintahan dan fasilitas sosial, penyelamatan arsip penting, serta edukasi mengenai pengelolaan sampah, limbah, dan kesiapsiagaan bencana. Kegiatan tersebut mempercepat pemulihan fungsi sanitasi dasar dan mendukung kembalinya aktivitas pemerintahan serta masyarakat. Meskipun demikian, keberhasilan ketahanan sanitasi jangka panjang tetap bergantung pada pengelolaan limbah yang sesuai standar, pendampingan teknis, pemeliharaan infrastruktur sanitasi, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, penerjunan Praja IPDN menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan ketahanan kesehatan dan sanitasi pascabanjir di Aceh Tamiang melalui kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, tenaga profesional, dan Masyarakat.

Referensi

Agustina, A., Laila, A. F., Prasyawan, E., & Ginting, R. (2026). Informasi Banjir di Aceh Tamiang: Citizen-Generated Content Versus Klarifikasi Pemerintah. *Jurnal*

- Indonesia: *Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 7(1), 178-187.
<https://doi.org/10.63447/jimik.v7i1.1782>
- Akaishi, T., Morino, K., Maruyama, Y., Ishibashi, S., Takayama, S., Abe, M., Kanno, T., Tadano, Y., & Ishii, T. (2021). Restoration of clean water supply and toilet hygiene reduces infectious diseases in post-disaster evacuation shelters: A multicenter observational study. *Heliyon*, 7(5), e07044.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07004>
- Alifa, S. N., Zalmita, N., Yulianti, F., & Furqan, M. H. (2025). Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis Dalam Pemetaan Lokasi Rawan Banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(5), 8138-8147.
<https://doi.org/10.56799/peshum.v4i5.10090>
- Anggraini, C., & Hartutik, S. (2024). Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Perilaku Pencegahan Penyakit Leptospirosis Pasca Bencana Banjir Pada Lansia Kampung Semaneggi. *Public Health and Safety International Journal*, 4(2), 109-122.
<https://doi.org/10.55642/phasij.v4i02.860>
- Antara News. (2026). *Perjuangan Kantah Kabupaten Aceh Tamiang selamatkan 75 ribu arsip pertahanan pascabencana*. Diakses dari:
<https://sumbar.antarane.ws.com/berita/747262/perjuangan-kantah-kabupaten-aceh-tamiang-selamatkan-75-ribu-arsip-pertahanan-pascabencana>
- ATR BPN. (2026). *Perjuangan Kantah Kabupaten Aceh Tamiang Selamatkan 75 Ribu Arsip Pertahanan Pascabencana*. Diakses dari:
<https://www.atrbpn.go.id/berita/perjuangan-kantah-kabupaten-aceh-tamiang-selamatkan-75-ribu-arsip-pertahanan-pascabencana>
- Basriwijaya, K. M. Z., Dianawati., Mardiyah, A., Zuhra, R., Mahdi, S., Hadisugelar, D., Anzitha, S., Putri, Y. R., Safrizal., & Zuhlilmi. (2026). Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana Banjir Bandang di Desa Gelanggang Merak Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 5(1), 867-871.
<https://doi.org/10.59025/hfjb4d55>
- CNN Indonesia. (2026). *Kasatgas PRR Minta Praja IPDN Kerja Keras Bersihkan Aceh Tamiang*. Diakses dari:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260404165349-25-1344268/kasatgas-prr-minta-praja-ipdn-kerja-keras-bersihkan-aceh-tamiang>
- Cornish, F., Breton, N., Moreno-Tabarez, U., Delgado, J., Rua, Aikins, A. DG., & Hodgetts, D. (2023). Participatory action research. *Nature Reviews Methods Primers*, 3(1), 1-37. <https://doi.org/10.1038/s43586-023-00214-1>
- Detik News. (2026). *Bima Arya Puji Kontribusi Praja IPDN terhadap Pemulihan Aceh Tamiang*. Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-8468439/bima-arya-puji-kontribusi-praja-ipdn-terhadap-pemulihan-aceh-tamiang>
- Erick, B., Ramadhan, N., Maqfirah, T. A. V., Kurniawan, A. F., & Radhial, M. (2026). Dari Empati Turun Ke Aksi: Upaya Kemanusiaan dalam Penyaluran Bantuan Korban Banjir Bandang Aceh Tamiang. *ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 12-21.
<https://doi.org/10.71153/zona.v3i2.501>
- Gemar News. (2026). *Kasatgas PRR Tito: Praja IPDN, Mari Kerja Keras Bersihkan Aceh*

- Tamiang. Diakses dari: <https://www.gemarnews.com/2026/04/kasatgas-prr-tito-praja-ipdn-mari-kerja.html>
- IDN Times. (2026). *Empat Puskesmas Aceh Masih Lumpuh, Menkes Tekankan Butuh Alat Berat*. Diakses dari: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/empat-puskesmas-aceh-masih-lumpuh-menkes-tekanan-butuh-alat-berat-oo-rkt5s-zw7z5m>
- Info Publik. (2026). *Kala Praja IPDN Bersihkan Lumpur Istana Bersejarah Benua Raja di Aceh Tamiang*. Diakses dari: <https://infopublik.id/kategori/bencana/964759/kala-praja-ipdn-bersihkan-lumpur-istana-bersejarah-benua-raja-di-aceh-tamiang>
- JPN. (2026). *Genap Sebulan Praja IPDN dan ASN Kemendagri Membantu Masyarakat Aceh Tamiang*. Diakses dari: <https://m.jpnn.com/amp/news/genap-sebulan-praja-ipdn-dan-asn-kemendagri-membantu-masyarakat-aceh-tamiang>
- Kantor Staf Presiden. (2026). *KSP Apresiasi Gotong Royong Praja IPDN Percepat Pemulihan Layanan Publik Aceh Tamiang*. Diakses dari: <https://www.ksp.go.id/ksp-apresiasi-gotong-royong-praja-ipdn-percepat-pemulihan-layanan-publik-aceh-tamiang.html>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Hujan, Tikus, dan Leptospirosis*. Diakses dari: <https://ayosehat.kemkes.go.id/hujan-tikus-dan-leptospirosis>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2026). *Kemenkes Gandeng Pemuda Sumatra Utara Untuk Pemulihan Layanan Kesehatan Pascabencana Sumatra*. Diakses dari: <https://www.kemkes.go.id/id/kemenkes-gandeng-pemuda-sumatra-utara-untuk-pemulihan-layanan-kesehatan-pascabencana-sumatra>
- Kompas. (2026). *Mandagri Lepas Praja IPDN, Bantu Percepat Pemulihan Pemerintahan dan Layanan Publik di Aceh Tamiang*. Diakses dari: <https://kilaskementerian.kompas.com/kemendagri/read/2026/01/03/13223941/mendagri-lepas-praja-ipdn-bantu-percepat-pemulihan-pemerintahan-dan-layanan>
- Kompas. (2026). *Petugas Masih Berjibaku Bersihkan Lumpur di RSUD Aceh Tamiang*. Diakses dari: <https://www.kompas.id/artikel/petugas-masih-berjibaku-bersihkan-lumpur-di-rsud-aceh-tamiang>
- Muslimah. (2015). Dampak Pencemaran Tanah dan Langkah Pencegahan. *Jurnal Penelitian Agrisamudra*, 2(1), 11-20. <https://doi.org/10.33059/jpas.v2i1.224>
- Notobroto, H. B., Mirasa, Y. A., & Rahman, F. S. (2021). Sociodemographic, behavioral, and environmental factors associated with the incidence of leptospirosis in highlands of Ponorogo Regency, Province of East Java, Indonesia. *Clinical Epidemiology and Global Health*, 12, 100911. <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2021.100911>
- Nurjanah, L., Febri, S. P., Azmi, F., Widya, D. A. S., Setywan, F. H., Malahayati, S., Lubis, P. F., Darmansyah, Lubis, W. H., Sari, R. M., Bella, R. A., & Pratama, T. R. Y. (2026). Program Pengabdian Masyarakat Berbasis Kemanusiaan bagi Masyarakat Terdampak Pascabencana Banjir di Alur Tani Dua, Tamiang Hulu, Aceh Tamiang. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 5(1), 702-709. <https://doi.org/10.59025/dy68mv58>

- Pemerintah Aceh. (2026). *Pemerintah Aceh Kerahkan Lima Alat Berat Bersihkan Sekolah di Taming*. Diakses dari: <https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/bencana/pemerintah-aceh-kerahkan-lima-alat-berat-bersihkan-sekolah-di-taming>
- Putra, R. R. M., Sulistyo, H., Utomo, R. A. T., Kusnadi, T., & Amiruddin, S. (2026). Optimalisasi Peran Praja dalam Manajemen Tanggap Darurat Pascabencana dan Kerja Bakti Sosial di Kabupaten Aceh Tamiang. *Journal of Social Change, Culture, and Society*, 1(1), 1-11. <https://doi.org/0000-0000>
- Rambe, T., Heriadi., & Rahmadi, M. T. (2026). Pemberdayaan Masyarakat Pasca-Bencana: Program Mitigasi Kebencanaan, Kesiapsiagaan Masyarakat, Sekolah Darurat Untuk Korban Banjir dan Longsor di Desa Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 267-287. <https://doi.org/10.47006/pendalas.v6i2.788>
- Sakti, A. S., Toka, W. D., Sandrawati., Nur, A., Abdullah, A., Imam, F. R. S., Yulimanida, H., Muhammad, A., & Hidayati, F. (2026). Penguatan Ketahanan Kesehatan Masyarakat Pascabencana Melalui Intervensi Kesehatan Terpadu dan Edukasi Berbasis Komunitas di Aceh Tamiang. *JMM: Jurnal Masyarakat Mandiri*, 10(2), 2331-2343. <https://doi.org/10.31764/jmm.v10i2.37721>
- Shaquille, J. A., Martha, F. Y. D., Hamdani, R. R., Azhari, L., Saputra, M. R. T., Romadhoni, P., Pigai, B. J., Kawer, A. D. S., Zalfa, R., Naufal, F., Ankares, M. A. B., & Andrise, R. (2026). Percepatan Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana Banjir Melalui Pendekatan Partisipatif di Kantor BPKD Aceh Tamiang. *JUAN: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 3(2), 9-15. <https://doi.org/10.63545/juan.v3.i2.223>
- Tempo. (2026). 733 Praja IPDN Terjun ke Aceh Tamiang, dari Makam Raja hingga Rumah Warga Jadi Target Pembersihan. Diakses dari: <https://www.tempo.co/info-tempo/733-praja-ipdn-terjun-ke-aceh-tamiang-dari-makam-raja-hingga-rumah-warga-jadi-target-pembersihan-2126462>
- Tempo. (2026). Kemendagri Akan Kirim lagi Praja IPDN ke Aceh Tamiang. Diakses dari: <https://www.tempo.co/politik/kemendagri-akan-kirim-lagi-praja-ipdn-ke-aceh-tamiang-2119295>
- Wahyudi, F., Ketty, N. D., Gawa, M. P., Maryam., & Kamaly, N. (2026). Sinergi Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Model Jepang dan Destana Aceh. *DAROTUNA: Jurnal of Administrative Science*, 7(1), 123-141. <https://doi.org/10.54471/idarotuna.v7i1.207>
